

ABSTRAKSI

Penulisan tesis berjudul **PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dimana masyarakat Pemegang Izin Pemakaian tanah menuntut agar mereka diberikan Hak Milik atas tanah yang mereka tempati. Keinginan dari masyarakat pemegang izin pemakaian tanah tersebut tidak selaras dengan keinginan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat dua permasalahan yaitu pengaturan pemberian Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) serta prosedur pemberian Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut ditemukan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan status Hak Milik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, namun pelaksanaan peraturan tersebut dalam praktek belum pernah ditemukan di Kota Surabaya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepentingan praktis terhadap keberadaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) yaitu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi atas pemakaian tanah Hak Pengelolaan (HPL). Prosedur pemberian Hak Milik atas tanah Hak Pengelolaan (HPL), dapat dilakukan dengan cara pelepasan tanah Hak Pengelolaan (HPL) oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

ABSTRACT ION

Writing a thesis entitled **PROPERTY RIGHTS ACQUISITION OF LAND FROM CITY GOVERNMENT RIGHTS MANAGEMENT IN SURABAYA** was motivated by rampant land disputes Rights Management Surabaya City Government Permit Holders community where the land use demands that they be given land Property which they occupy. The desire of the community land use permit holders are not in harmony with the wishes of Surabaya City Government as holder of Rights Management (HPL). Based on the background of the author raised two issues namely the provision setting the Property Rights land from the land management rights and procedures of land Property Rights derived from the land rights of Surabaya City Government Management. Based on the analysis of these issues found that the management rights can be given to third parties with the status of this thing owned. Regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 1 of 1977, but the implementation of these regulations into practice has not been found in Surabaya. Based on the analysis conducted by the author, the Government of Surabaya City of practical importance to the existence of land as a source of Rights Management (HPL) Regional Revenue with picked up a levy on land use Rights Management (HPL) Surabaya City Government. Property procedures on land HPL, can be done by way of soil release Rights Management (HPL) by the City Government of Surabaya after receiving approval from the Regional Representatives Council (DPRD).

